

**Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012)**

**Peni Sedyaningsih
Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA.¹**

**Jurusan Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya
Email: sedyani@gmail.com**

Abstract

This research aims to examine the influence of the characteristic of local government (size, level of wealth, dependence level, and government expenditure) and BPK audit finding to the performance of local government. Local government performance is measured by scores on the evaluation of local government performance (EKPPD). Population of this research is all the regencies in South Sulawesi from the year of 2009-2012. Total sample are 80 regencies using purposive random sampling. The result of this research indicates that dependence level and audit findings significant negative influence on the performance of local government. While size, level of wealth, and government expenditure had no influence to the performance of local government in South Sulawesi.

Keywords: *characteristic of local government, audit finding, the performance of local government, local government organizers report (LPPD), evaluation of local government performance (EKPPD)*

PENDAHULUAN

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi diawali dengan munculnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya, Pemda wajib mempertanggungjawabkannya dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007. LPPD merupakan salah satu bentuk pelaporan mengenai pertanggungjawaban kinerja tata kelola pemerintahan daerah terhadap masyarakat. Dalam LPPD sendiri mencakup informasi yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

Kinerja tata kelola Pemda yang dituangkan dalam LPPD tersebut memerlukan adanya evaluasi yang disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009. Selain LPPD, informasi pelengkap untuk EKPPD ini antara lain laporan pertanggungjawaban APBN, informasi keuangan daerah dan laporan kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil dari EKPPD tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi

¹ Supervisor

Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil EKPPD digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom.

Salah satu informasi pelengkap EKPPD yaitu informasi keuangan daerah. Dalam keuangan daerah terdapat informasi yang mencerminkan karakteristik daerah tersebut, antara lain ukuran pemerintah daerah yang dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan jumlah belanja daerah. Semakin besar kemampuan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki dan diharapkan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pun semakin baik. Sementara itu, salah satu pengukuran kinerja pada EKPPD ini adalah pengukuran pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan salah satu Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yaitu LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengungkapkan temuan audit BPK atas ketidakpatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian terkait mengenai karakteristik Pemerintah Daerah, temuan audit BPK dan kinerja Pemda dan menjadi acuan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasaki (2012) mengenai pengaruh karakteristik daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian tersebut yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, realisasi belanja modal dan temuan audit BPK, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hanya untuk objek penelitian, pada penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) mengambil sampel seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan peneliti hanya membatasi sampel semua pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah dipahami sebagai penyerahan kewenangan beberapa urusan pusat ke daerah sehingga daerah memiliki kapasitas untuk mengatur pemerintahan yang lebih efektif di daerah (Yasin, 2011). Demi terwujudnya tujuan dari otonomi daerah dan untuk perwujudan *Good Corporate Governance*, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah daerahnya, baik dari sisi keuangannya maupun dari tata kelolanya. Oleh karena itu, setiap Kepala Daerah wajib memberikan laporan kinerja dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat setiap tahunnya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah (PP No. 3 Tahun 2007). LPPD digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja (Permendagri No. 73 Tahun 2009). Tujuan dari adanya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan menurut Gamawan Fauzi yang dikutip oleh Ellu (2010) yaitu untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengelola daerahnya dan hasil yang dicapai. Pelaksanaan EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional. Sumber informasi dari EKPPD antara lain LPPD, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah dan laporan kinerja instansi pemerintah daerah. Hasilnya digunakan pemerintah untuk program pengembangan kapasitas peningkatan kinerja dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama kepada daerah-daerah yang memiliki prestasi kinerja rendah. Pemerintah mempersiapkan pemberian penghargaan (*award*) kepada daerah yang mempunyai prestasi kinerja tertinggi secara nasional ataupun yang berkinerja tinggi selama 3 tahun berturut-turut (Juknis EKPPD, 2014).

Karakteristik Daerah

Karakteristik daerah pada penelitian ini yang sesuai untuk menggambarkan kondisi keuangan pada Pemerintah Daerah mengacu pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang digambarkan dengan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan belanja modal.

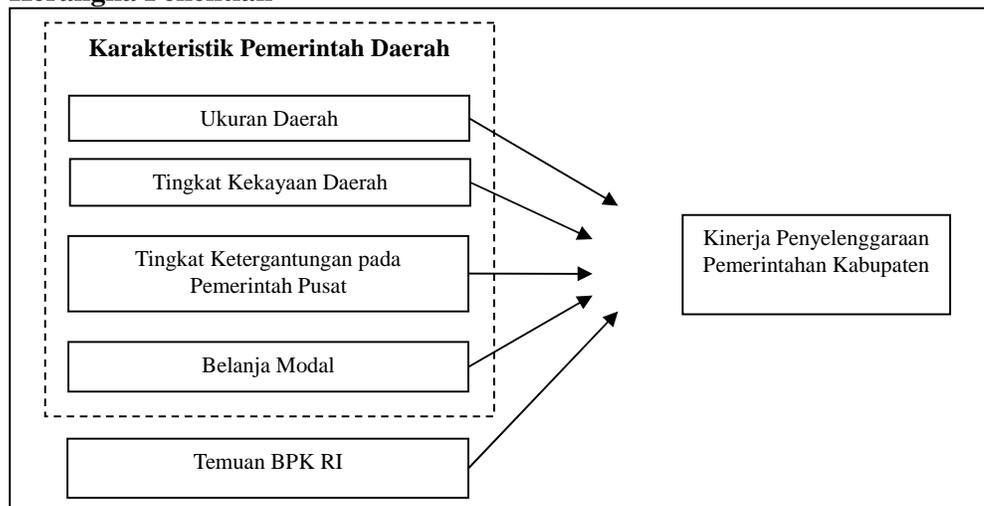
1. Ukuran daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah tersebut atau total asetnya. Kusumawardani (2012) menyebutkan bahwa ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah (Hartoyo, 2014a).
2. Tingkat kekayaan daerah menggambarkan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri yang diprosikan dengan PAD yang diperoleh. Menurut Setiawan (2011), semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri dan tidak tergantung kepada bantuan eksternal (pemerintah pusat dan atau provinsi). Lebih lanjut, Setiawan (2011) menyatakan bahwa semakin besar rasio PAD menunjukkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat percaya akan kualitas kinerja Pemerintah Daerahnya.
3. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diprosikan dengan DAU yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk membantu daerah dalam pembiayaan pengeluarannya. Damayanty (2011) menyatakan dengan semakin besarnya PAD (*ceteris paribus*) maka kapasitas fiskal meningkat, celah fiskal menurun dan berimbas pada menurunnya DAU. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penurunan DAU menunjukkan adanya peningkatan PAD yang berarti daerah semakin baik dalam mengelola kekayaan daerah yang dimiliki.

4. Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan tidak bisa dipungkiri bahwa belanja modal sangat penting dalam aktivitas ekonomi suatu Negara termasuk daerah. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa daya saing suatu Negara termasuk pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dalam Negara tersebut. Oleh karena itu, bagaimanapun belanja modal suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Setiawan, 2011).

Pemeriksaan Laporan Keuangan

BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Salah satu Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara/daerah, potensi kerugian Negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (BPK, 2013). Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini menunjukkan seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda dan kerugian material yang ditimbulkan atas pelanggaran tersebut. Selain itu, temuan audit terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Pemda tersebut dalam melakukan setiap kegiatannya kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kerangka Penelitian



Hipotesis Penelitian

Ukuran Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam mengelola dan menjaga asetnya (Suhardjanto et al, 2010). Selain itu, Sumarjo (2010) menambahkan pelayanan yang baik dapat diberikan Pemda jika didukung dengan aset yang baik pula. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya, karena memiliki sumber daya dan fasilitas yang lebih besar dibanding dengan daerah yang jumlah asetnya sedikit. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian Indrawan (2013), Sumarjo (2010), dan Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang

menyatakan bahwa ukuran (*size*) daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda, baik kinerja keuangan maupun kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya. Berdasarkan pada konsep dan penelitian terdahulu mengenai ukuran daerah, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₁ : Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tingkat Kekayaan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hartoyo (2014b) menyatakan bahwa jika PAD dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan dan potensi daerah maka akan dapat menumbuhkan daya saing kompetitif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumarjo (2010) bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Uraian tersebut didukung dengan penelitian Indrawan (2013), Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Julitawati, *et al* (2012), Nurdin (2015) dan Sudarsana (2013) yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja baik kinerja keuangan, kinerja akuntabilitas maupun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan penjelasan di atas mengenai konsep dan penelitian terdahulu tingkat kekayaan daerah, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂ : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tingkat Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Dengan kata lain DAU menunjukkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang akan menambah Pendapatan Daerah. Sayangnya, menurut (Damayanty, 2011), formulasi perhitungan DAU tidak memberikan stimulus bagi daerah untuk meningkatkan PAD karena merasa dapat mengandalkan DAU. Secara tidak langsung, semakin tinggi presentase DAU yang di dapat oleh suatu daerah menunjukkan daerah tersebut semakin tidak mandiri dan kinerjanya belum optimal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nurdin (2015) dan Julitawati *et al* (2012) yang menghasilkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja Pemdanya, baik sisi keuangan maupun akuntabilitas kinerjanya. Namun, penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) dan Sumarjo (2010) menghasilkan pengaruh yang positif atas DAU terhadap kinerja pemerintah daerah. Mendasar dari konsep dan perbedaan hasil penelitian pada tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H₃ : Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Belanja Modal dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menurut Halim (2008), belanja modal merupakan investasi yang berupa pengadaan/pembelian aset yang bermanfaat lebih dari 12 bulan dan aset tersebut

digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Belanja modal sangat terkait dengan pembangunan infrastruktur daerah yang digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut logikanya semakin besar belanja modal, maka akan semakin banyak infrastruktur yang terbangun yang artinya pelayanan kepada masyarakat akan semakin bagus, pertumbuhan semakin meningkat, dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat (Setiawan, 2011). Dengan kata lain, kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah-nya pun akan semakin baik. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) dan Mustikarini dan Fitriyasi (2012), hasilnya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Perbedaan antara penjelasan di atas dan hasil dari beberapa penelitian yang menyebabkan peneliti ingin menkonfirmasi hasilnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Temuan Audit BPK dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK, dalam hal ini pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Budianto, 2012). Penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menghasilkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menggunakan data tahun 2007, hasil serupa juga dihasilkan oleh Sudarsana (2013) dengan menggunakan data tahun 2010. Penelitian lain yang mempertegas pernyataan di atas adalah hasil penelitian yang dilakukan Budianto (2012) yang menunjukkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak temuan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemerintah daerah tersebut. Sesuai dengan konsep dan hasil penelitian sebelumnya tentang temuan audit, hipotesis penelitian ini adalah.

H₅ : Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan *hypothesis testing* yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Indriantoro dan Supomo, 2002). Penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan pada pusat (DAU), realisasi belanja modal, dan temuan audit BPK mempunyai pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di Sulawesi Selatan. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai dengan 2012, dengan total sampel 80 dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Variabel Dependen

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dan merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran, 2010). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah skor kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Sulawesi Selatan

tahun 2009-2012. Skor kinerja ini didapat dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada tahun 2009-2012 dengan *range* 0-4.

Variabel Independen

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran, 2010). Variabel bebas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel ukuran daerah

Variabel ukuran daerah diukur dengan jumlah total aset yang dimiliki oleh suatu Pemda. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, total aset dihitung dengan menggunakan Logaritma Naturalnya, karena perbedaan yang cukup signifikan dari besarnya total aset masing-masing daerah, dan logaritma natural (Ln) dari total aset bertujuan untuk mengurangi perbedaan tersebut.

$$\text{Ukuran Daerah} = \text{Ln (Total Aset)}$$

2. Variabel tingkat kekayaan daerah

Tingkat kekayaan daerah menggambarkan pendapatan yang bersumber dari kekayaan daerah itu sendiri, dan dapat menunjukkan seberapa mandiri daerah tersebut dalam membiayai pengeluarannya. Tingkat kekayaan daerah dihitung dengan membandingkan PAD yang diperoleh dengan total pendapatan daerah.

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3. Variabel tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat

DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membantu daerah membiayai pengeluaran rutinnya. Besarnya DAU tiap daerah dapat diukur dengan menggunakan presentase DAU yang diterima dengan jumlah total Pendapatan Daerahnya.

$$\text{Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$$

4. Variabel belanja modal

Realisasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah mencerminkan seberapa besar porsi belanja daerah yang digunakan untuk belanja modal. Hal ini sesuai dengan pernyataan DJPK (2013) yang menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal.

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

5. Variabel temuan audit

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan pada pemeriksaan atas LKPD mengenai pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap sistem pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Temuan audit yang digunakan dalam variabel ini adalah temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, variabel temuan audit diukur dengan jumlah kasus temuan. Jumlah kasus temuan menunjukkan seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda tersebut.

$$\text{Temuan Audit} = \text{Temuan Audit (jumlah kasus)}$$

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah metode statistik regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 \text{Ln_TA} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DAU} + \beta_4 \text{BM} + \beta_5 \text{TEM} + e$$

Keterangan:

- Y = Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 a = Koefisien Konstanta
 β_1 = Koefisien Regresi Variabel Independen
 Ln_TA = Ukuran Daerah
 PAD = Tingkat Kekayaan Daerah
 DAU = Tingkat Ketergantungan dengan Pemerintah Pusat
 BM = Belanja Modal
 TEM = Temuan BPK RI
 e = Error

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berusaha untuk menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), seberapa jauh data data bervariasi (standar deviasi) dan sebagainya (Santoso, 2002). Hasil statistik deskriptifnya adalah sebagai berikut.

Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Standar Deviasi
EKPPD	2.5443	3.29	0.72	0.40601
Ukuran Daerah	14.2438	14.75	13.69	0.26062
Kekayaan Daerah (%)	4.8795	13.58	1.99	2.42530
Ketergantungan terhadap Pusat (%)	62.6125	72.36	44.90	6.01214
Belanja Modal (%)	23.3164	61.80	10.71	7.68306
Temuan Audit	13.8750	29.00	5.00	5.06008

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21 (2015).

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas diuji menggunakan uji *one sample test Kolgomorov-Smirnov* untuk lebih meyakinkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos uji asumsi normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolgomorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006). Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai *Asymptotic Significance* sebesar 0.754. Nilai tersebut di atas 0.05 sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil pengujian dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Ukuran Daerah	0.872	1.147
Tingkat Kekayaan Daerah	0.731	1.367
Tingkat Ketergantungan terhadap Pem. Pusat	0.667	1.500
Realisasi Belanja Modal	0.706	1.416
Temuan Audit	0.852	1.174

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS (2015)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearitas dengan melihat nilai VIF variabel independen yang seluruhnya memiliki nilai <10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil pengujian Durbin-Watson menghasilkan nilai pengujian Durbin-Watson adalah sebesar 1.744, yang nilainya berada di antara -2 sampai +2. Maka, dapat disimpulkan data penelitian tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heterokedasdisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan titik-titik tersebar secara acak dan tidak berpola, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedasdisitas.

Hasil Uji Hipotesis dengan Analisis Regresi

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis dengan melakukan analisis linier berganda yang akan menghasilkan model umum persamaan regresi. Peneliti menggunakan tingkat kesalahan atau alpha sebesar 5% dalam analisis linier berganda ini. Hasil pengujian hipotesis dengan analisis linier berganda adalah sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi

Hasil pengujian hipotesis dengan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *R-Square* (R^2) sebesar 27.0%. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 27.0%. Sedangkan sisanya sebesar 73.0% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam variabel ini.

2. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien dan signifikansinya masing-masing dapat dilihat di tabel 4.8.

Hasil Pengujian Statistik T

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.970	2.522		3.160	.002
Ukuran Daerah	-.244	.166	-.157	-1.474	.145
Tingkat Kekayaan Daerah	.007	.019	.042	.363	.717
1 Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	-.021	.008	-.311	-2.560	.012
Belanja Modal	-.010	.006	-.196	-1.658	.102
Temuan Audit BPK	-.030	.009	-.380	-3.531	.001

a. Dependent Variable: kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS (2015)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat dirumuskan model penelitian sebagai berikut.

$$Y = 7.970 - 0.021DAU - 0.030TEM$$

Keterangan:

Y : Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 DAU : Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat
 TEM : Temuan Audit BPK

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan Temuan BPK RI berpengaruh terhadap skor evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan Belanja Daerah tidak berpengaruh.

1. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran daerah yang diproksikan dengan total aset daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di Sulawesi Selatan. Hal ini berarti jumlah aset daerah yang besar belum tentu kinerja penyelenggaraan pemerintahannya baik. Hasil ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), Indrawan (2013) dan Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menyebutkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Namun, hasil ini sesuai dengan penelitian Sudarsana (2013) yang menyebutkan bahwa ukuran daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja Pemda.

Permasalahan dalam pengelolaan aset di daerah yang belum baik dan optimal kemungkinan merupakan sebab tidak berpengaruhnya aset terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Pengelolaan aset seperti belum optimalnya pemanfaatan aset yang ada, kurangnya pemeliharaan aset sehingga banyak aset yang rusak, ataupun penatausahaan dari segi pencatatan aset yang belum baik menyebabkan aset daerah belum dapat meningkatkan pelayanan Pemda terhadap masyarakat dan juga belum dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pemerintah daerah tersebut.

2. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah menurut hasil pengujian tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD belum mempunyai peran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), namun tidak sesuai dengan penelitian Juliawati, et al (2012), Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Indrawan (2013), Sudarsana (2013) dan Nurdin (2015) yang menghasilkan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda.

Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh dari tingkat kekayaan daerah ini kemungkinan disebabkan oleh porsi PAD yang masih sangat rendah dengan melihat rata-rata PAD yang diperoleh tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ini hanya sebesar 4,88% dari total pendapatan daerah. Berarti 95,12% pendapatan daerah lainnya diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang tidak berasal dari kekayaan daerah, dan sebagian besarnya berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Dengan melihat perolehan rata-rata PAD tiap daerah, wajar saja jika PAD mempunyai peran yang minim terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di Sulawesi Selatan.

3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliawati et al (2012) dan Nurdin (2015) yang menyatakan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) dan Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menyebutkan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda.

Tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa seberapa besar daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat. Semakin besar DAU yang diterima daerah, semakin besar dana transfer yang dilakukan Pemerintah Pusat berarti semakin besar celah fiskal dan semakin kecil kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Dengan kata lain, daerah belum dapat mengelola secara optimal kekayaan daerahnya. Pengelolaan daerah yang belum optimal menunjukkan kinerja penyelenggaraan yang belum baik pula.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan sesuai dengan hasil pengujian di atas. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) dan Nurdin (2015) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Namun tidak mendukung hasil penelitian Nugroho dan Rohman (2012) dan Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menyatakan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda.

Kemungkinan penyebab dari hasil penelitian ini adalah lemahnya tata kelola keuangan daerah, baik dari proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan belanja modal. Namun pada kenyataannya, sering terjadi ketidakcocokan antara program/kegiatan dengan *output/outcome* yang dihasilkan, yang menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan lebih memperhatikan proses *input*-nya saja. Terdapat beberapa kasus pengeluaran belanja modal yang kurang memperhatikan kebutuhan dari masyarakat luas. Selain itu, banyaknya kasus *mark up* terhadap belanja, khususnya belanja modal (karena biasanya nilainya jauh lebih besar) yang mengakibatkan barang modal yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasinya.

5. Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah temuan audit dari BPK maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hasil ini mendukung penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Budianto (2012) dan Sudarsana (2013) yang juga menyatakan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Jumlah kasus temuan audit menunjukkan jumlah pelanggaran yang ditemukan oleh BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu komponen dalam penilaian EKPPD

adalah kepatuhan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin patuh daerah tersebut terhadap peraturan perundang-undangan, semakin hati-hati Pemda tersebut dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya, yang akhirnya berdampak pada semakin bagus kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Namun sebaliknya, semakin banyak kasus temuan audit, maka semakin rendah skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dan kinerjanya pun dapat dikatakan belum baik.

Simpulan

Tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan penurunan ketergantungan pada Pemerintah Pusat yang ditandai dengan penurunan alokasi DAU yang diterima dan semakin sedikit temuan audit BPK mengakibatkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada variabel ukuran daerah, penelitian ini menyimpulkan tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan aset di daerah. Kurangnya pemeliharaan, belum optimalnya pemanfaatan aset dan penatausahaan yang belum baik menyebabkan aset daerah belum dapat meningkatkan pelayanan Pemda terhadap masyarakat dan juga belum dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pemerintah daerah tersebut. Tingkat kekayaan daerah yang diprosikan dengan PAD juga tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persentase PAD yang diperoleh Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan selama tahun 2009-2012 yang masih sangat rendah mengindikasikan masih rendahnya peran PAD terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan variabel ukuran daerah dan tingkat kekayaan daerah, realisasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Lemahnya tata kelola keuangan daerah baik dari proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan belanja modal menyebabkan realisasi belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemda belum dapat memberikan peningkatan pelayanan dan masyarakat dan juga kinerja penyelenggaraan pemerintahannya.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

1. Penelitian terkendala pada *updating* data. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih baru sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dan memberikan kesimpulan yang lebih baik.
2. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik Pemda yang digambarkan melalui ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat, dan belanja modal serta temuan BPK RI. Variabel tersebut hanya menjelaskan sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel-variabel penelitian, yang tidak terbatas pada aspek keuangan saja.
3. Masih sedikitnya literatur pendukung dan beberapa proksi lain yang juga dapat mencerminkan variabel ukuran daerah seperti luas daerah, jumlah penduduk dan jumlah SKPD. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mencari literatur pendukung yang kuat mengenai proksi-proksi dari variabel-variabel independennya dan juga dapat mengembangkan proksi yang lebih mampu mewakili variabel penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. IHPS Semester I Tahun 2013. Diunduh tanggal 27 Oktober 2014. <www.bpk.go.id>
- Budianto, Wendy. 2012. Pengaruh Opini, Temuan Audit, dan Gender terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Indonesia tahun 2008-2010. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Damayanty, Sofia Arie. 2011. Menelisik Kemampuan Keuangan Daerah. Dalam *Risiko Fiskal Daerah*. Era Adicitra Intermedia. Jakarta.
- DJPk. 2013. Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah. Diunduh tanggal 29 April 2015. <www.djpk.go.id>
- Elu, Kamillus. 2010. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah. Diunduh pada tanggal 12 November 2014. <www.ahok.org>
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hartoyo, Nafsi. 2014. Optimalisasi Aset Negara/Daerah. Diunduh tanggal 03 Februari 2015. <www.bppk.depkeu.go.id>
- _____. 2014. Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda. Diunduh tanggal 03 Februari 2015. <www.bppk.depkeu.go.id>
- Indrawan, M. Yusuf. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. BPF. Yogyakarta.
- Julitawati, Ebit, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana*. Universitas Syiah Kuala.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. Petunjuk Teknis Manual Evaluasi EKPPD. Diunduh tanggal 12 Februari 2015. <<https://www.academia.edu>>
- Kusumawardani, Media. 2012. “Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. *Accounting Analysis Journal 1*. Universitas Negeri Semarang.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007”. *Simposium Nasional Akuntansi 15*. <<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>>
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. 2012. “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)”. *Diponegoro Journal of Accounting*. Universitas Diponegoro.
- Nurdin, Fandy. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- Santoso, Singgih. 2002. *Buku Latihan Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2010. *Research Method For Business : Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi Keempat*. Salemba Empat. Jakarta.
- Setiawan, Hadi. 2011. Kinerja Keuangan Daerah pada Era Otonomi. Dalam *Risiko Fiskal Daerah*. Era Adicitra Intermedia. Solo.
- Sudarsana, Hafidh S. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Semarang.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. 2010. "Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities". *Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M UNS*.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Yasin, Akhmad. 2011. Implikasi Peraturan Daerah terhadap Perekonomian Daerah. Dalam *Risiko Fiskal Daerah*. Era Adicitra Intermedia. Solo.